

**STRATEGI DANA KAMPANYE PARTAI DEMOKRAT
KOTA PADANG PADA PEMILU
LEGISLATIF 2009**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

Oleh :

YURIZKI
BP. 05 193 076



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

ABSTRAK

Yurizki Skripsi S1. Strategi Dana Kampanye Partai Demokrat Kota Padang pada Pemilu Legislatif Tahun 2009. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. 81 Halaman, 21 Buku, 3 Skripsi, 2 Dokumen dan 2 Artikel.

Indonesia yang merupakan Negara demokrasi, membutuhkan Parpol serta pelaksanaan Pemilu agar demokrasi tersebut berjalan dengan baik. Pada Pemilu legislatif 2009 yang memakai sistem proporsional terbuka, memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih partai serta caleg yang diinginkan. Sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 pada tanggal 9 April, KPU memberikan kesempatan kepada Parpol beserta caleg untuk melaksanakan kegiatan kampanye, yang berguna untuk menyampaikan program kerja serta visi misi caleg kepada konstituen. Dalam pelaksanaan kampanye, dana merupakan sesuatu yang sangat penting, tanpa dana kegiatan kampanye tidak akan berjalan. Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu menyatakan bahwa: dana yang dikeluarkan pada pelaksanaan kegiatan kampanye disebut dana kampanye.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti memakai proses triangulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh Partai Demokrat Kota Padang memiliki dua jenis strategi dana kampanye pada pemilu Legislatif 2009, yakni strategi dana pada kampanye terbuka dan strategi dana pada kampanye terbatas. Jenis strategi yang dilakukan Partai Demokrat kota Padang tersebut secara umum mengacu pada konsep strategi Peter Schroder, yakni strategi ofensif, defensif dan campuran. Untuk strategi penggunaan dana kampanye terbuka yang dananya digunakan untuk melakukan pengerahan masa dan pembuatan baliho, jenis strategi yang digunakan yaitu strategi campuran antara ofensif dengan defensif. Dimana pada strategi ofensif Partai Demokrat Kota Padang menekankan perbedaan yang jelas dengan partai lainnya, dalam merebut suara. Sementara pada strategi defensif menekankan pada posisi Partai Demokrat sebagai partai pemerintah dalam merebut suara.

Pada kampanye terbatas kampanye terbagi atas dua yaitu : kampanye terbatas oleh partai dan kampanye terbatas oleh caleg. Kampanye terbatas yang dilakukan oleh partai terfokus pada program eksternal dan internal yang dilakukan pada pemilu legislatif 2009, disini strategi ofensif yang dipakai Partai Demokrat Kota Padang dimana dalam meningkatkan jumlah suara Partai Demokrat Kota Padang melaksanakan program-program yang akhirnya membuat pandangan positif yang tinggi pada Partai Demokrat Kota Padang. Adapun program-program tersebut yaitu pengokohan kader, atributisasi dan dialog dengan masyarakat. Sementara itu pada kampanye terbatas yang dilakukan oleh caleg Partai Demokrat Kota Padang, penggunaan dana kampanyenya digunakan untuk membuat alat peraga kampanye serta untuk sumbangan atau bantuan kepada masyarakat.

Key Words : Strategi, Dana Kampanye dan Pemilu Legislatif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu Negara, sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, atau menciptakan kekuasaan warga Negara atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintah tersebut. Di dalam sistem demokrasi dikenal prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik Negara yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Sekarang ini, demokrasi telah menjadi suatu sistem pemerintahan yang paling populer di atas muka bumi. Hampir semua Negara di dunia menyatakan pemerintahannya berlandaskan demokrasi¹. Adapun standar suatu sistem dikatakan demokrasi yakni harus ada partai politik dan pemilu.

Indonesia yang menganut sistem demokrasi, pemilu dianggap sebagai pilar utama karena melibatkan partisipasi rakyat, dan partai politik merupakan salah satu alat untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Adapun defenisi partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui UU No. 31 tahun 2002 tentang partai politik². Ramlan Subakti menyebutkan 7 fungsi dari sebuah partai politik, yakni : sosialisasi politik, rekrutmen politik,

¹ Dalam bentuknya, demokrasi pertama kali dikembangkan oleh masyarakat Yunani, khususnya Athena, sebagai suatu sistem pemerintahan kota. Landasan pemikiran dari Negara kota tersebut adalah suatu pemerintahan yang melibatkan peran dari banyak orang. Gagasan tersebut dalam perkembangan sejarah kemudian dikembangkan lagi skalanya dalam bentuk Negara bangsa yang jangkauannya lebih luas. Lebih lanjut lihat Bendan Gunawan, *Apa itu Demokrasi*, CV. Muhasari, Jakarta, 2000

² Komaruddin Hidayat, dkk. *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 20.

partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik dan kontrol politik³.

Pemilihan umum tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran partai-partai politik ditengah masyarakat. Keberadaan partai politik merupakan salah satu wujud nyata kedaulatan rakyat Indonesia. Maka dari itu rakyat harus diberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik.

Pasca reformasi tahun 1998, telah 3 kali Indonesia melaksanakan pemilu, yakni pemilu 1999 yang diikuti 48 partai, Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai dan terakhir pemilu 2009 yang diikuti 44 partai. Adapun perbedaan pemilu 1999 dengan pemilu 2004 dan 2009 terdapat pada sistem pemilunya, yakni pemilu 2004 dan 2009 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, baik memilih anggota legislatif maupun memilih Presiden dan Wakilnya.

Pelaksanaan pemilu 2009, yang dilaksanakan 2 periode yakni pemilu legislatif dan pemilu Presiden, kampanye merupakan suatu kegiatan yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan pemilu. Dimana kampanye adalah sebuah kegiatan politik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau partai politik yang ambil bagian dalam pemilu, dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat banyak.

Pada pemilu legislatif 2009, terdapat 2 jenis kampanye yang telah diatur pelaksanaannya oleh KPU, yakni kampanye terbatas yang dilaksanakan mulai tanggal 5 Juli 2008 sampai tanggal 5 April 2009, pada kampanye terbatas ini, partai politik peserta pemilu hanya boleh melakukan pertemuan terbatas, tatap

³ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992. hlm.45.

muka, kampanye di media masa cetak dan elektronik, serta penyebaran dan pemasangan alat peraga.

Sementara jenis kampanye yang kedua yaitu, kampanye terbuka, yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Maret 2009 sampai tanggal 5 April 2009, pada kampanye terbuka ini, partai politik peserta pemilu melakukan pengerahan masa dan rapat umum.

Kampanye yang dilakukan oleh partai-partai peserta pemilu dalam rangka melakukan salah satu tahapan dalam pemilu, membutuhkan suatu biaya, dimana biaya ini lebih akrab disebut dengan dana kampanye. Menurut UU No. 10 tahun 2008 pasal 127, dana kampanye yaitu dana yang dikeluarkan pada pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang menjadi tanggung jawab partai politik peserta pemilu masing-masing.

Dimana dana kampanye bersumber dari:

1. Partai politik
2. Calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota dari partai politik yang bersangkutan
3. Sumbangan yang sah menurut hukum

Pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2009 merupakan momentum yang sangat penting, momen ini tidak hanya penting sebagai tahapan perguliran kekuasaan secara nasional akan tetapi juga penting dilihat sebagai perubahan konstelasi ekonomi, politik dan sosial baru. Persoalan dana kampanye pemilu berada pada irisan penting antara perguliran kekuasaan politik dan pergeseran kekuasaan ekonomi mengikuti bandul kekuasaan. Bangunan kapitalisme yang rentan terhadap posisi kekuasaan dan kebijakannya membuat dukungan

pendanaan pada saat pemilu menjadi amat penting untuk menetralkan relasi awal yang terbentuk antara kuasa politik dan ekonomi. Secara nasional pada pemilu legislatif 2009 jumlah dana kampanye dari keseluruhan partai yang ikut pemilu legislatif 2009 berjumlah 850 Milyar⁴.

Tabel 1.1. 10 Partai dengan dana kampanye terbesar pada pemilu legislatif 2009 secara nasional.

NO	PARTAI	DANA KAMPANYE
1.	Gerindra	Rp. 308 Milyar
2.	Demokrat	Rp. 243,8 Milyar
3.	Golkar	Rp. 164,5 Milyar
4.	PKS	Rp. 36,5 Milyar
5.	Hanura	Rp. 19 Milyar
6.	PAN	Rp. 18 Milyar
7.	PBB	Rp. 10,9 Milyar
8.	PDI P	Rp. 10,6 Milyar
9.	PPP	Rp. 4,1 Milyar
10.	PKB	Rp. 3,6 Milyar
	Jumlah	Rp. 819 Milyar

Sumber : KPU 2009

Pada pelaksanaan pemilu legislatif 2009 khususnya Kota Padang, kampanye oleh partai-partai politik juga dilaksanakan, dimana jumlah dana kampanye dari keseluruhan partai yang ikut pemilu legislatif 2009 berjumlah 3,5 Milyar.

⁴ www.kpu.com, 2009 diakses pada tanggal 15 Agustus 2009 11:22:00 Wib

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan kampanye pada pemilu legislatif 2009 merupakan sesuatu yang sangat penting bagi partai peserta pemilu beserta calegnya, dalam rangka meraih dukungan dari konstituennya. Begitu juga dengan Partai Demokrat kota Padang pelaksanaan kampanye dijadikan suatu ajang untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, sehingga masyarakat mendukung dan memilih Partai Demokrat Kota Padang pada pemilu legislatif 2009.

Bentuk kampanye yang dilakukan Partai Demokrat Kota Padang pada pemilu legislatif 2009 dapat dibagi atas 2 bentuk :

1. Kampanye terbuka
2. Kampanye terbatas

Pada kampanye terbuka Partai Demokrat Kota Padang melakukan pengerahan masa, dana yang digunakan untuk pelaksanaan kampanye terbuka ini dimana dana ini bersumber keseluruhannya dari DPP Pusat. Penggunaan dana kampanye terbuka Partai Demokrat Kota Padang digunakan untuk :

- ⇒ Pengerahan masa di Kota Padang
- ⇒ Pengerahan masa di luar Kota Padang
- ⇒ Sewa tempat kampanye dan artis
- ⇒ Pembuatan baliho dan spanduk

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metode Kearifan Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta, 2001. Raja Grafindo Persada.
- Chester I. Barnard. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Rineka Cipta, Jakarta. 1999.
- Cipto, Bambang. *Partai Kekuasaan dan Militarisme*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Drucker, Peter. *Dalam Memaju SDM Berdaya*, GramediaPustaka, Jakarta, 2002.
- Faisal, Sanafiah. *Formal-formal Penelitian Sosial*, Rajagrafindo, Jakarta, 2003.
- Firmanzyah, Phd. *Mengelola Partai Politik*, Jakarta : Rajawali, 2000
- Gunawan, Bondan. *Apa itu Demokrasi*, CV. Muliasari, Jakarta, 2000
- Haryono. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Hidayat, Komaruddin, dkk. *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, Grafinsos, Jakarta, 2004.
- Maleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : 2002. PT. Remaja rosda Karya*.
- Maran, Rafael Raga. *Pengantar Sosiologi Politik : Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Marsono. *Pemilu 1997*, Djambatan, Jakarta 1997.
- Plano, Jack. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta : Rajawali, 1985.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Said, Ali Damaik. *Fenomena Partai Keadilan*, Teraju, Jakarta.
- Sarwono. *Strategi Kampanye Pemilu Langsung*, Umbulharjo, Yogyakarta, 2008.
- Schroder, Peter. *Strategi Politik*, Edisi Revisi Pemilu 2009, Friedrich-Nauman-2008 Stiftung.
- Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Sudiharto, A. *Pemilu dan Pendidikan Politik*, Osis, Jakarta, 1983.
- Suyanto, Bagong, Sutinah, ed. *Metode Penelitian Sosial: berbagai pendekatan alternatif*, Jakarta, 2009, Kencana.
- Usulan LIPi tentang RUU Politik, Pustaka Mizon, Jakarta, 1998.